



DETERMINATION OF POVERTY AT THE DISTRICT/CITY LEVEL IN YOGYAKARTA PROVINCE 2007-2018

Resiska Septianingrum¹, Deden Dinar Iskandar^{2✉}

^{1,2} Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 1

Abstract

Poverty is a thing that occurs in all countries both developing countries and developed countries, and one of them is in Indonesia. Special Region of Yogyakarta is ranked first as the region with the highest poverty rate in Java. This study aims to analyze the effect of regional gross domestic product, population, health and unemployment rate on poverty in Special Region of Yogyakarta. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The data usage is time series data for 12 years (2007-2018) and cross section data of 5 districts / cities in the Province of Special Region of Yogyakarta. The results of this study indicate that the population and health variables have a positive and significant effect on the number of poor people in the Province of D.I. Yogyakarta. GRDP variable has a negative and significant effect on the number of poor population in the Province of D.I. Yogyakarta, while the unemployment rate variable has a negative and not significant effect on the number of poor people in the Province of D.I. Yogyakarta.

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2021

Disetujui April 2021

Dipublikasikan Juni 2021

Keywords:

Poverty; panel data; Fixed Effect Model (FEM)

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Jl Prof Soedarto

SH, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: dedeniskandar@lecturer.undip.ac.id

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu tujuan suatu negara. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan diantaranya dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Kemiskinan merupakan suatu hal yang terjadi di semua negara baik negara berkembang dan negara maju, salah satunya di negara Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Meskipun pemerintah telah banyak melaksanakan program untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 angka kemiskinan di Indonesia 10,12 persen. Dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Pulau Jawa yaitu 13,34 juta jiwa.

Pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini yang terpusat di pulau Jawa tidak membuat pulau Jawa terlepas dari masalah kemiskinan. Jika dilihat dari presentase penduduk miskin,

D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi yaitu 12,36 persen pada tahun 2017 dengan rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 14,62 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yaitu 10,12 persen dan rata-rata kemiskinan selama tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 11,54 persen (BPS, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari upaya pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Gambaran kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Menurut Norton (dalam Wirawan dan Arka, 2015) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat apabila diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Dimana jumlah penduduk yang tinggi merupakan salah satu penyebab permasalahan kemiskinan. Teori Malthus dalam Agustina, dkk (2018) mengemukakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat terbatas, hal ini mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam memenuhi kebutuhan.

Pertumbuhan penduduk bisa mengurangi angka kemiskinan tergantung dari masyarakat mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Pemerintah sulit untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat jika jumlah penduduk tinggi. Kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi dan sempitnya keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut akan menciptakan pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan begitu akan memberikan dampak mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2011).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah kesehatan. Masalah kesehatan merupakan hal yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini diakibatkan karena keterbatasan ekonomi mereka dalam upaya mempersehat diri dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Tingkat kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Kemiskinan dipandang dari rendahnya derajat kesehatan menurut Kartasmita dalam Sangadji (2014) akan menentukan gizi seseorang dengan demikian jika miskin gizi juga rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir dan prakarsa yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah semakin meningkat.

Berdasarkan uraian masalah kemiskinan di D.I. Yogyakarta beserta faktor-faktor yang dikemukakan sebelumnya perlu diuji secara empiris, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh PDRB, jumlah penduduk, kesehatan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut BPS (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil

dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditikomoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

Menurut teori Nurkse, kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali di kenalkan oleh Nurkse. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Arsyad, 2016).

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan: "Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin" (*A country is poor because is poor*). Salah satu faktor sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad, 2016).

Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (2015), didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai

masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan (BPS, 2015). Menurut teori Malthus dalam (Rosyetti, 2009) jumlah pertumbuhan penduduk terlihat melebihi dari jumlah pertumbuhan persediaan makanan. Dia menyatakan bahwa penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur, misalnya dalam lambang : 1,2,4,8,16, dan seterusnya. Sedangkan persediaan makanan tumbuh secara deret hitung, misalnya: 1,3,5,7,9, dan seterusnya. Apabila penduduk tidak dikendalikan mengakibatkan jumlah penduduk terus bertambah dan kekurangan bahan pangan, sehingga kelaparan dan mengakibatkan kemiskinan.

Hubungan Kesehatan terhadap Kemiskinan

Angka Harapan Hidup (AHH) dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS, 2015). Angka harapan hidup adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincolin (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi.

Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan

Menurut BPS (2015), tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di ukur dari banyaknya jumlah orang yang menganggur. Semakin banyak jumlah pengangguran maka akan mengakibatkan permasalahan sosial, diantaranya adalah semakin minim pendapatan masyarakat tersebut. Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital. Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi pustaka dan teknik dokumentasi. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time-series data) untuk kurun waktu tahun 2007-2018 serta data deret unit (cross-section) yang meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, PDRB, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan estimasi data panel *fixed effect model* dan diolah menggunakan program Eviews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

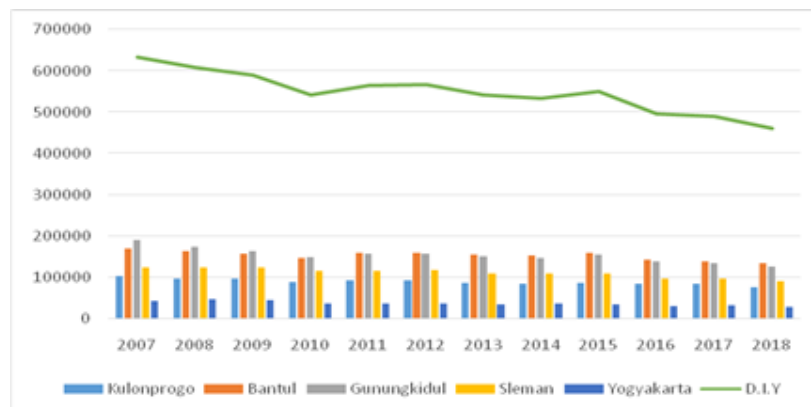
Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah 5 kabupaten/kota yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta. D.I. Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Kondisi perekonomian di D.I. Yogyakarta berdasarkan data dari BPS, menunjukkan tingkat PDRB harga konstan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 PDRB harga konstan D.I. Yogyakarta sebesar 56473 juta rupiah hingga tahun 2018 mencapai 98063 juta rupiah. Dilihat dari jumlah penduduknya, D.I. Yogyakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 3.359.404 jiwa hingga pada tahun 2018 mencapai 3.802.872 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk D.I. Yogyakarta sebesar 1180,914 orang per km² pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah D.I. Yogyakarta cukup padat walaupun jika dilihat menurut kabupaten/kota tidak tersebar merata. Selanjutnya, perkembangan kesehatan melalui perkembangan angka harapan hidup Provinsi D.I. Yogyakarta yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan 2018. Rata-rata angka harapan hidup di D.I. Yogyakarta yaitu 74,38 tahun pada tahun 2018. Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode 2007-2018 memiliki tren yang menurun dan berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu mencapai 6,17 persen dan tahun 2018 menjadi 3,31 persen.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinannya, D.I. Yogyakarta termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan menurut BPS (menggunakan garis kemiskinan), pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta sebesar 12,36 persen. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2007-2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi menunjukkan tren yang menurun.

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami fluktuasi dari 2007-2018. Pada tahun 2007 tercatat jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 633450 jiwa dan tahun 2018 tercatat sebanyak 460110 jiwa.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta 2007-2018



Sumber : BPS, *DIY Dalam Angka 2007-2018*

Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

Uji statistik analisis regresi dapat dilakukan dengan Uji Signifikansi Simultan (Uji F), Uji t-statistik, dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Hasil dari pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan model *Fixed Effect* terdapat dalam tabel.

Tabel 1. Hasil Estimasi dengan menggunakan Model Fixed Effect

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.178852	4.849671	1.480276	0.1450
LNPDRB	-1.273588	0.146720	-8.680378	0.0000
LNAHH	1.393787	0.678329	2.054738	0.0450
LNPDDK	2.751366	0.603180	4.561432	0.0000
LNTPT	-0.047767	0.027307	-1.749271	0.0863
R-squared		0.995021		
Adjusted R-squared		0.994240		
F-statistic		1273.952		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Berdasarkan hasil uji statistik analisis regresi pada Tabel 1, bila dimasukkan ke persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{LNKEMISKINAN} = 7,17 - 1.27\text{LNPDRB} + 1.39\text{LNAHH} + 2.75\text{LNPDDK} - 0.04\text{LNTPT} + \varepsilon$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0.994240. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PDRB, jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta sebesar 99,42 %. Sedangkan sisanya sebesar 0,58% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1 yang pada model ini menggunakan $n=60$ dan $k=5$, diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari nilai α (0.05). Dengan kata lain, variabel PDRB, jumlah penduduk, angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1, diperoleh nilai probabilitas t statistik pada variabel produk domestik regional bruto (LNPDRB), jumlah penduduk (LNPDDK) dan angka harapan hidup (LNAHH) masing-masing sebesar 0.0000, 0.0000 dan 0.0450 atau lebih kecil dari nilai α . Sedangkan nilai probabilitas t statistik pada variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0.0863 atau lebih besar dari nilai α . Dapat disimpulkan bahwa, variabel PDRB, jumlah penduduk, dan angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta.

Interpretasi Hasil

Pengaruh PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel PDRB dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Artinya, variabel PDRB secara parsial pada $\alpha 5\%$ berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta. Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dilihat dari nilai koefisiennya yaitu sebesar -1.273588 yang artinya bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -0.531196 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan teori apabila jumlah PDRB menurun maka jumlah penduduk miskin sebaliknya jumlahnya bertambah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan. perkembangan. Industri di Indonesia merupakan faktor penting dalam pembentukan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki tanda koefisien positif. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah penduduk miskin. Nilai positif dari analisis regresi tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yang mana menurut Nelson dan Leibstein dalam Sukirno (1983) terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari α (0.05) yaitu sebesar 0.0000, artinya secara statistik variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dilihat dari nilai koefisiennya yaitu sebesar 2.751366 yang artinya bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 2.751366 persen.

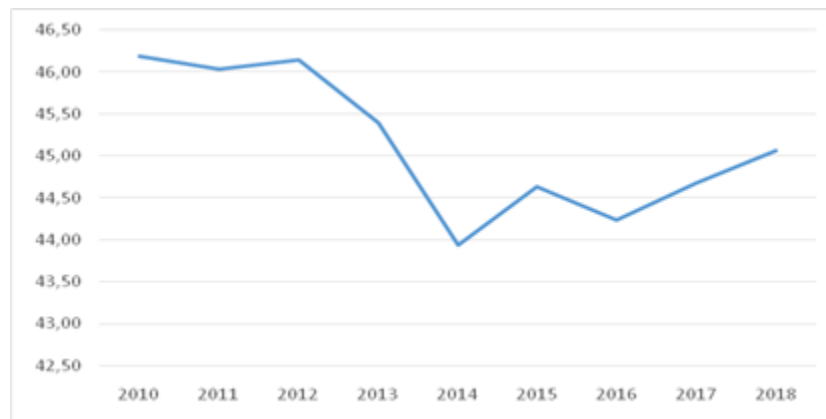
Hasil ini sejalan dengan penelitian Azizah, dkk (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas yang lebih kecil dibandingkan taraf α^* (0.05) yakni sebesar 0.0450 dengan nilai koefisiennya adalah sebesar 1.393787. Artinya apabila terjadi peningkatan angka harapan hidup sebesar 1 persen akan diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1.393787 persen. Hal ini tidak sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sangadji (2014) yang menyatakan bahwa secara statistik angka harapan hidup berpengaruh signifikan dan bertanda positif terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan angka harapan hidup yang semakin tinggi saat ini sudah diatas 65 tahun, secara teori usia produktif adalah umur 15-65 tahun, dengan demikian angka harapan hidup di atas umur produktif akan semakin berkurang produktivitasnya sehingga secara langsung berdampak pada pendapatan. Angka harapan hidup di Provinsi D.I. Yogyakarta sendiri mencapai 74,38 pada tahun 2018. Bagi penduduk dengan angka harapan hidup yang sudah di atas umur produktif, dan mereka yang tidak bekerja justru akan menjadi beban tanggungan keluarga. Angka beban ketergantungan atau *dependency ratio* di D.I. Yogyakarta mengalami fluktuasi, dengan angka ketergantungan tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu mencapai 46,19, dalam artian bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 46 orang penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2018



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat D.I. Yogyakarta 2010-2018

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di D.I Yogyakarta

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari α (0.05) yaitu sebesar 0.0863, artinya secara statistik variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di D.I Yogyakarta. Hasil hipotesis ini sejalan dengan penelitian Rusdarti dan Sebayang (2017) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebab penduduk atau seseorang miskin bukan bersumber dari besarnya tingkat pengangguran melainkan oleh indikator lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil data analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk dan angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat daerahnya yang nantinya dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya PDRB untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan, sehingga diperlukan adanya upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Misalkan dengan lebih mengencangkan program KB bagi masyarakat. Selain itu peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain yang dapat menunjang kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*. 2(1), 167–180.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Bantul dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Data Strategis DIY 2015*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Gunungkidul dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Kota Yogyakarta dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Kulonprogo dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Sleman dalam angka tahun 2007-2018*. Yogyakarta.
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Lincolin, A. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Lincolin, A. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Rosyetti. (2009). Studi Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk Dengan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi*, 17(2), 51–63.
- Rusdarti, & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*, 9(1), 1–9.
- Sangadji, M. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Media Trend*, 9(2), 162–180.
- Simatupang, P. & Saktyanu K. D. (2003). Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 51(3), 191 – 324.
- Siregar, H. (2006). Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. In *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan*. Jakarta: INDEF.
- Sukirno, S. (1983). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2011). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. (3rd ed). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.